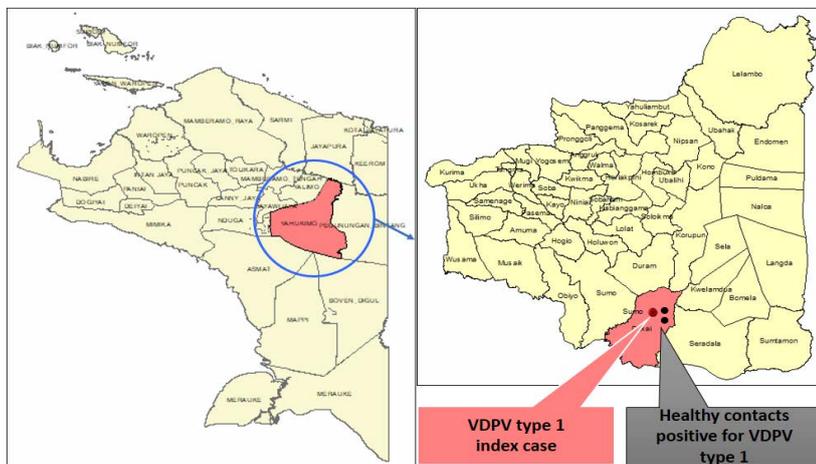


Kasus cVDPV1 di Provinsi Papua, Indonesia, 2018 - 2019



## Sorotan Mingguan

- Tidak ada kasus VDPV baru dilaporkan minggu ini - EPI minggu 33.
- Cakupan sub PIN putaran kedua menggunakan target populasi daerah, diperkirakan mencapai 89%.
- Pada tanggal 19 Agustus, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua menandatangani Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan imunisasi polio. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 20 Agustus di Papua, Kementerian Kesehatan melaksanakan pertemuan yang membahas rencana kegiatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan vaksinasi, yang tersebar di 14 kabupaten berisiko tinggi.
- Untuk menguatkan dukungan sub PIN polio, pada tanggal 19-20 Agustus, Kementerian Kesehatan juga melaksanakan pertemuan dengan para pemuka agama yang didukung oleh UNICEF. Sebanyak 46 peserta mengikuti pertemuan ini. Pertemuan menghasilkan kesepakatan kunci dan aksi untuk meningkatkan jumlah capaian anak tervaksinasi dan meningkatkan sensitivitas surveilans AFP.
- Masalah keamanan yang meningkat di Provinsi Papua dan Papua Barat mungkin menghambat respon KLB Polio.
- Sub PIN Polio putaran kedua terus dilakukan di Provinsi Papua untuk memberikan kesempatan kepada kabupaten guna meningkatkan cakupan vaksinasi dan melindungi lebih banyak anak. Tenaga kesehatan secara intensif melakukan sweeping (kunjungan ke rumah-rumah) untuk mengidentifikasi adanya anak yang belum divaksinasi.
- Jumlah kasus confirmed (terkonfirmasi) polio virus tipe 1 (cVDPV1) di Indonesia masih tetap 1, di mana sampel positif didapatkan dari dua anak sehat yang mengonfirmasi adanya sirkulasi VDPV tipe 1 di Kabupaten Yakukimo, Provinsi Papua.
- Peningkatan kapasitas Petugas Surveilans di Papua dan 11 Provinsi berisiko tinggi telah dilaksanakan minggu lalu, berupa presentasi dan kunjungan lapangan termasuk HRR (Hospital Record Review). Di akhir kegiatan, setiap provinsi membuat perencanaan untuk peningkatan surveilans AFP yang akan dimonitoring oleh tingkat pusat.
- Tidak ada kasus baru AFP yang dilaporkan minggu ini. Jumlah total kasus AFP yang dilaporkan secara resmi tahun 2019 di Papua adalah sebanyak **45** kasus, dan di Papua Barat sebanyak **15** kasus.

## Ringkasan

Kasus baru cVDPV1 : 0  
 Jumlah total kasus cVDPV1: 1  
 Jumlah anak sehat positif kontak dengan VDPV1: 2  
 Level KLB: 1  
 Deteksi terkini: 13 Feb 2019

## Detail Kasus

Jenis kelamin: Laki-laki  
 Umur: 31 bulan  
 Mulai kelumpuhan: 27 Nov 2018  
 Status vaksinasi: 0 dosis

## Area terinfeksi

Kecamatan Dekai  
 Kabupaten Yahukimo  
 Provinsi Papua

## Respon KLB

Lokasi: Provinsi Papua dan Papua Barat  
 Siapa: Semua anak usia 0 hingga kurang dari 15 tahun  
 Target: 1.26 juta anak

## Sub PIN

- Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang berbeda-beda untuk menjangkau seluruh anak, yang disesuaikan dengan 3 zona risiko sosial dan geografis, yaitu (1) Papua Barat (2) wilayah Papua yang mudah diakses atau merupakan dataran rendah, dan (3) wilayah Papua yang aksesibilitasnya rendah atau merupakan dataran tinggi.
- Wisatawan yang mengunjungi Papua selama lebih dari empat minggu, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing harus divaksinasi di pintu masuk (entry point) sampai wabah dinyatakan telah mampu diatasi. Vaksinasi dilakukan di 5 titik transit, termasuk bandara dan pelabuhan utama di Provinsi Papua. Pihak berwenang Pelabuhan Papua Barat juga telah memulai vaksinasi transit di pelabuhan dan bandara, di beberapa kabupaten termasuk Sorong dan Manokwari.
- Vaksinasi di perbatasan antar negara dilakukan di 5 kabupaten (Kota Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Merauke) yang memiliki lintas batas resmi antara Provinsi Papua dan Papua Nugini.

## Putaran 1

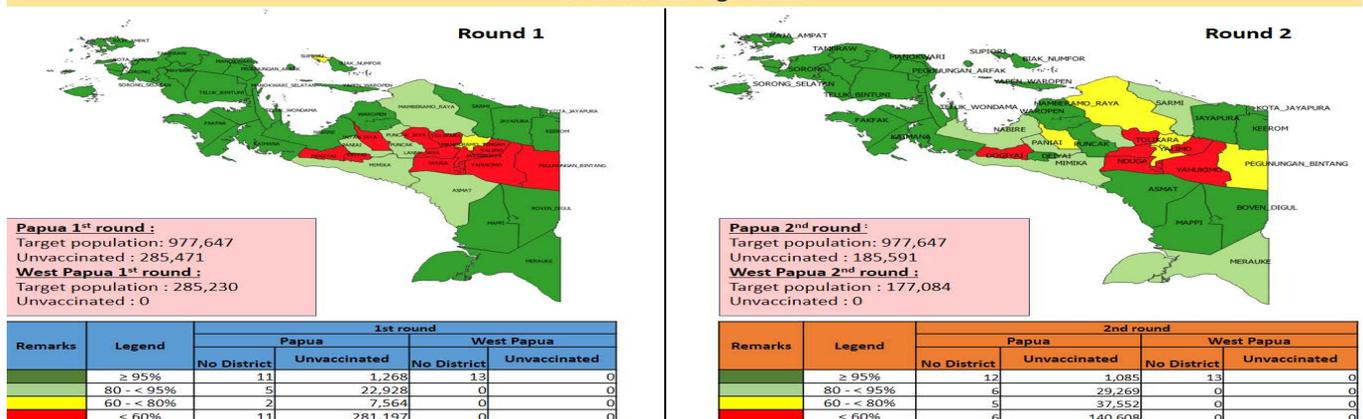
- Sub PIN putaran 1 yang menargetkan anak usia 0 hingga kurang dari 15 tahun dengan pemberian bivalent oral polio vaccine (bOPV) telah selesai dilaksanakan di Papua dan Papua Barat pada tanggal 28 April. Laporan terakhir, sebanyak 1,004,670 anak telah divaksin di putaran pertama dari 1,362,877 anak yang menjadi target berdasarkan data Pusdatin atau target proyek nasional di kedua Provinsi tersebut.
- Seluruh 13 kabupaten** di Papua Barat melaporkan pencapaian minimal 95% dari target populasi.
- Di Provinsi Papua, **11 dari 29 kabupaten** telah mencapai 95% cakupan imunisasi. Sementara, cakupan di tiga kabupaten mencapai lebih dari 80%. Sebanyak 15 kabupaten lainnya dilaporkan masih kurang dari 80%, termasuk di dalamnya kabupaten Yahukimo yang cakupannya hanya sebesar 19%.
- Sebanyak 218 Rapid Convenience Assessments (RCA) telah selesai diimplementasikan setelah putaran 1. Di Papua Barat, total 48 RCA telah dilakukan untuk memeriksa 2,439 anak-anak di semua kabupaten; yang cakupannya diperkirakan mencapai 95%. Di Papua, 170 RCA dilakukan di **20/29 kabupaten** yang menilai 8,597 anak. Data mengindikasikan capaian vaksinasi secara keseluruhan mencapai 91% - 90% di daerah dataran rendah dan 93% di daerah dataran tinggi. Sementara, 4 dari 12 kabupaten di daerah dataran rendah (Asmat, Merauke, Kepulauan Yapen, Biak Numfor) dan 4 dari 8 kabupaten di daerah dataran tinggi (Puncak, Puncak Jaya, Jayawijaya, Yahukimo) telah dilakukan RCA dengan capaian sebesar 95%.

## Putaran 2

- Sub PIN putaran 2 telah selesai dilaksanakan di Provinsi Papua Barat. Cakupan yang dilaporkan oleh Papua Barat >100 %. Ketiga belas Kabupaten secara merata melaporkan cakupan tinggi, yakni **>95%**.
- Sub PIN putaran 2 di Papua diperpanjang sampai adanya peninjauan kembali di awal September 2019. Sampai 21 Agustus, cakupan yang dilaporkan Papua adalah **82%** (menggunakan target data Pusdatin). Sementara, cakupan menggunakan populasi target daerah diperkirakan sebesar **89%**. Dengan menggunakan perkiraan target daerah tersebut, **15/29 kabupaten** di Papua telah mencapai cakupan >95%, 20 kabupaten (14 di daerah dataran rendah, 6 di daerah dataran tinggi) dari 29 kabupaten telah mencapai cakupan setidaknya **80%**.
- Strategi khusus yang diterapkan untuk mencapai sisa target anak sebanyak 10-15%, terutama di daerah kabupaten dataran tinggi, yakni melalui sweeping, kepemimpinan politik yang intensif, koordinasi dan kolaborasi antar kementerian.
- Perhatian khusus diberikan pada Kabupaten Yahukimo. Selama 4 minggu terakhir, dengan dukungan dari penerbangan Dimomim, 4 tim telah diberangkatkan ke 5 Puskesmas dan Pustu di Yahukimo, dengan tujuan memberikan vaksinasi tambahan bagi 646 anak: pada penerbangan pertama ke Puskesmas Sumtamon, sebanyak 264 anak mendapatkan imunisasi dan 382 anak sisanya didapatkan dari empat penerbangan tim ke Puskesmas Holuwon dan Lolat; Pustu Kabianggema dan Puskesmas Endomen. Data ini belum dimasukkan dalam laporan resmi cakupan imunisasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Dua penerbangan lainnya sudah dijadwalkan tetapi ditunda karena pertimbangan kondisi cuaca dan ketersediaan pesawat. Terdapat perbedaan yang besar antara target nasional dan target daerah Yahukimo dengan perkiraan cakupan bervariasi antara **47%** (menggunakan data Pusdatin) dan **73%** menggunakan data setempat.
- Provinsi Papua Barat telah melaksanakan 36 RCAs di **9 dari 13 Kabupaten**. Secara keseluruhan, sebanyak 1.862 anak usia 1-15 tahun telah diperiksa. Data mengindikasikan bahwa dari **98%** anak yang diperiksa telah diimunisasi. Alasan utama mengapa anak tidak tervaksinasi di Papua Barat adalah karena mereka sedang bepergian atau sakit. Sedangkan di Papua, 42 RCAs telah diselesaikan selama putaran 2 dari 4 kabupaten di daerah dataran tinggi dan 6 kabupaten di daerah dataran rendah. Sebanyak 2,269 anak telah diperiksa. Data mengindikasikan bahwa 91% anak yang diperiksa telah diimunisasi. Di Papua, alasan utama mengapa anak tidak tervaksinasi karena anak/orang yang mengasuh sedang bepergian, kurangnya informasi mengenai kampanye ini dan lokasi titik vaksinasi.

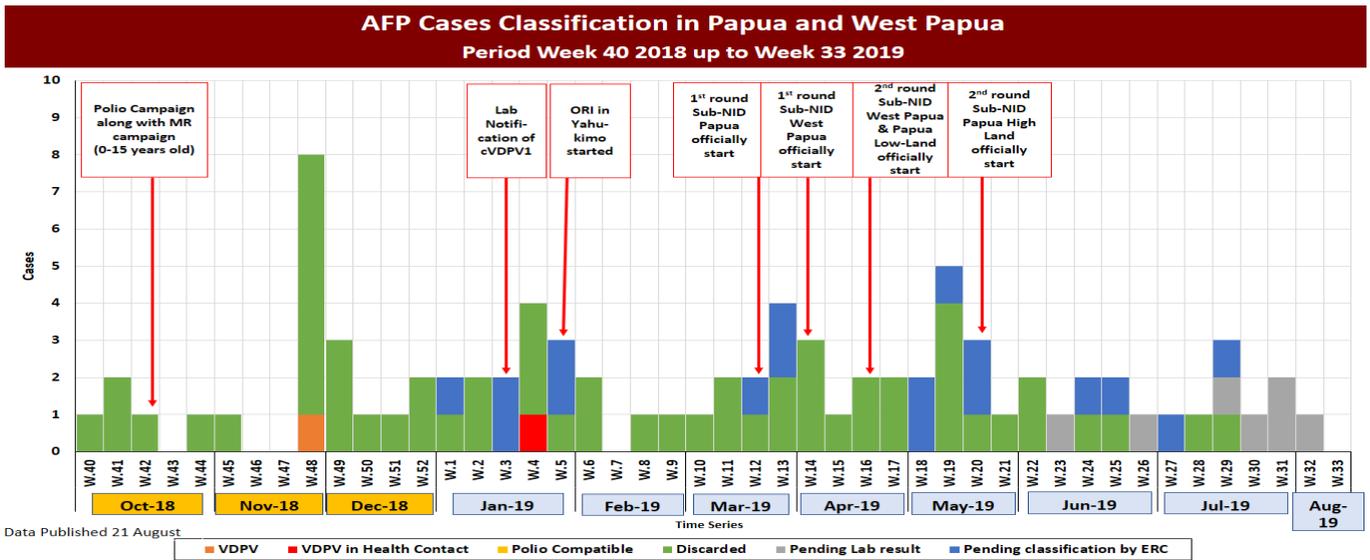
### Polio Sub NID coverage in Papua and West Papua Provinces

Data as of 21 August 2019



## Ringkasan Surveilans

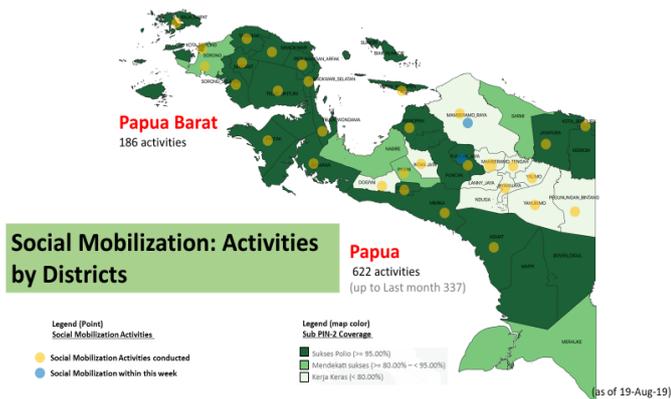
- Tahun 2018, angka Non-Polio Acute Flaccid Paralysis (NP AFP) di Indonesia dilaporkan sebesar **2.42** dengan spesimen adekuat sebesar **78.4%**. Sebanyak 9 dari 34 provinsi telah memenuhi dua indikator utama untuk surveilans AFP: >2 kasus atau lebih AFP non-polio per 100.000 anak di bawah 15 tahun dan >80 persen atau lebih kasus AFP dengan spesimen adekuat.
- Di minggu ke-33, 2019, angka NP AFP tahunan Indonesia adalah **1.29** dengan spesimen adekuat sebesar **79.5%**.
- Di minggu ke-33, 2019, angka NP AFP tahunan Provinsi Papua adalah **4.03** dengan spesimen yang adekuat sebesar **54.1%**, 20 kasus AFP masih klasifikasi iaksi pending. Sementara di Papua Barat, angka NP AFP sebesar **5.52**, dengan spesimen adekuat sebesar 53.3%, 4 kasus AFP masih klasifikasi pending.
- Komisi ahli Indonesia merencanakan pertemuan ad-hoc di Papua untuk meninjau sisa kasus AFP 2019 yang masih klasifikasi pending di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- Surveilans aktif dan pelaporan kasus AFP terus meningkat di kedua Provinsi tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, kedua provinsi masih memiliki kesulitan dalam membuat laporan dan investigasi kasus yang tepat waktu. Peningkatan pengumpulan sampel tinja yang cukup dan tepat waktu adalah prioritas bagi kedua provinsi.
- Kementerian Kesehatan telah melaksanakan pelatihan surveilans AFP di Timika, Papua pada tanggal 6-9 Agustus dengan tujuan menguatkan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit, KKP, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas. Jumlah peserta sebanyak 52 orang berasal dari 16 kabupaten (9 di daerah dataran rendah dan 7 di daerah dataran tinggi), dengan narasumber dan fasilitator pejabat senior Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan WHO Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan kunci dan aksi untuk mencapai kualitas surveilans AFP yang baik, melalui peningkatan koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten dan Puskesmas.
- Selanjutnya, pelatihan peningkatan kapasitas Petugas Surveilans bagi 11 provinsi lain yang berisiko tinggi juga dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan di Bogor pada tanggal 12-16 Agustus. Setiap provinsi telah memiliki rencana komprehensif untuk meningkatkan surveilans AFP dalam waktu 3 bulan ke depan.
- Tinjauan Rekam Medis Rumah Sakit (HRR) di 12 provinsi berisiko tinggi terus berlanjut. Di Papua, 35/35 Rumah Sakit telah ditinjau. Dan di Papua Barat, 18/19 Rumah Sakit telah ditinjau. Di Papua Barat, peninjauan untuk Rumah Sakit lainnya direncanakan akan selesai pada awal September.
- Pada pengambilan sampel surveilans lingkungan tahun 2019, sebanyak 19 sampel didapatkan dari 8 area yang berbeda di 3 kabupaten, yakni Kota Jayapura, Jayapura dan Yakuhiro. Hasilnya negatif untuk 17 sampel, sementara 2 lainnya masih menunggu hasil. Sedangkan untuk Papua Barat, 2 sampel didapatkan dari Manokwari juga masih menunggu hasil.



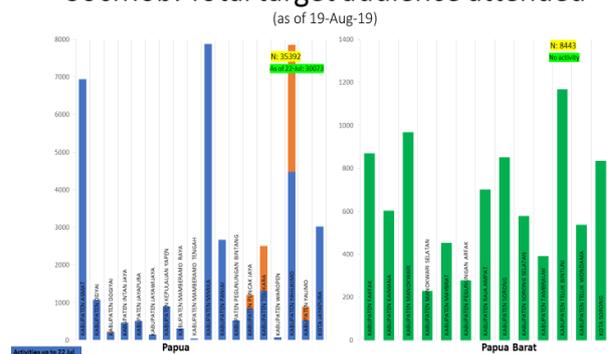
Kiri: Staf Ahli Teknologi Kesehatan dan Globalisasi (dr. Slamet) dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua (dr. Aloisius Giyai) pada Pelatihan surveilans AFP di Mimika, Provinsi Papua (6-9 Agustus). Foto: Endang Sri Utami WHO Indonesia. Kanan: Petugas kesehatan mengumpulkan specimen tinja dari dua kontak sehat di Kab. Dekai. Foto: Renny Waridjo/WHO Indonesia.

## Komunikasi dan Sosial Mobilisasi

- Sampai 19 Agustus 2019, 622 kegiatan yang melibatkan masyarakat dan sosial mobilisasi (CE/SM) telah dilakukan di Papua, mencapai 35,392 anak, termasuk in luencer (pemengaruh media sosial) dan tokoh masyarakat. Pada putaran 2, kegiatan CE/SM memiliki 'kantong-kantong' target sistematis yang dikhususkan untuk anak yang belum diimunisasi di daerah dengan cakupan rendah.
- Kampanye Polio dilaksanakan secara berkesinambungan, bersamaan dengan kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tahun 2019. Bhayangkari (Perhimpunan istri POLRI), Polisi Daerah (Polda) Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Pramuka, UNICEF, Gapai dan Wahana Visi Indonesia (WVI) berpartisipasi dalam perayaan ini di Kota Jayapura, dari tanggal 8-16 Agustus 2019. Kegiatan tersebut dirancang guna meningkatkan kesadaran mengenai Polio dan mendorong keterlibatan seluruh masyarakat untuk pemberantasan Polio di Papua.
- Kampanye Polio juga dilakukan dalam kegiatan Car Free Day (CFD). Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan Bhayangkari, Polda Papua, UNICEF, Gapai, dan WVI melaksanakan rangkaian kegiatan dalam CFD tanggal 11 Agustus 2019. Tim panitia mengisi kegiatan tersebut dengan acara aerobik yang menyenangkan, permainan, pemeriksaan kesehatan, dalam tema "Hidup sehat, bebas dari Polio". Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye pemberantasan Polio, sebagai salah satu cara untuk menunjukkan betapa pentingnya vaksinasi Polio kepada masyarakat luas.
- Kampanye pemberantasan Polio secara rutin dilaksanakan setiap CFD di bulan Agustus 2019, untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan dukungan masyarakat. Ketua Bhayangkari, Ibu Watie Rudolf A. Rodja turu hadir pada kegiatan tanggal 11 Agustus 2019.
- Untuk mendorong vaksinasi Polio, iklan Layanan Masyarakat juga diputar di Bandara Sentani, yang menghadirkan beberapa pejabat dan tokoh penting gereja di Papua. Iklan yang berbentuk video ini akan terus diputar di Bandara Sentani sampai bulan depan.
- Kegiatan kampanye yang menggandeng Babinkamtibmas Polres Paniai di Paniai. Setelah mendapat instruksi dari Kapolda Papua agar secara aktif mendukung Sub PIN Polio di Papua, Babinkamtibmas - salah satu bagian dari Polisi, mendukung kegiatan sosialisasi imunisasi Polio ke masyarakat di Kampung Kopo Wiler, Puskesmas Enarotali, kabupaten Paniai.
- Sosialisasi imunisasi Polio selama pendistribusian dana desa di Kabupaten Puncak. Kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik untuk melaksanakan sosialisasi, karena umumnya masyarakat dari seluruh desa akan berkumpul, dan memberi peluang agar dapat menjangkau audiens yang lebih besar sekaligus melaksanakan vaksinasi.



### SocMob: Total target audience attended



Kiri: Istri kepala desa melakukan sosialisasi di Kampung Jae, Kecamatan Wandai, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Kanan: Perimanan yang mengedukasi selama Car Free Day (CFD) di depan kantor Gubernur. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan Kampanye Polio kepada masyarakat dengan tema "Hidup Sehat, Bebas Polio. Foto: Husny / UNICEF.

## Mobilisasi Dukungan yang Optimal

### Kementerian Kesehatan

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus menugaskan para pakar ke Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mendukung perencanaan, pengawasan, koordinasi dan evaluasi kegiatan penanggulangan Polio



### WHO

- WHO telah membuka kantor cabang di Jayapura, Provinsi Papua dan merekrut 10 petugas nasional untuk mendukung kegiatan di Papua dan Papua Barat. Para petugas tersebut ditempatkan di kabupaten berisiko tinggi untuk bekerja langsung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.
- Pertemuan jangka menengah (mid-term review meeting) telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15-16 Agustus 2019. Mitra Polio juga turut hadir. Tim WHO akan fokus pada penjangkauan anak-anak yang belum tervak-sinasi dan menguatkan surveilans AFP di daerah 'silent' (tidak ada laporan kasus).
- Dua tambahan asisten data telah bergabung bersama tim Polio WHO, salah satunya ditempatkan di Jayapura sementara yang lainnya di Jakarta agar dapat menguatkan analisis data dan pembuatan keputusan berbasis bukti.
- WHO menugaskan kembali dua konsultan Polio dari Papua Barat selama bulan Juli untuk mendukung dua daerah berisiko tinggi (daerah dataran tinggi) di tahap perencanaan dan pelaksanaan.

### UNICEF

- UNICEF memiliki dua kantor cabang yang berlokasi di ibukota Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim-tim tersebut telah diperkuat dengan dukungan petugas nasional dan konsultan imunisasi dan CD4; bersamaan dengan penempatan kembali spesialis EPI dari Jakarta dan kantor cabang lainnya di seluruh Indonesia.
- Dari 7 kabupaten yang memiliki cakupan rendah di Yalimo, Puncak, Mimika, Mamberamo Tengah, Asmat, Tolikara dan Intan Jaya, beserta dukungan dari UNICEF dan mitra di Kabupaten Yalimo, Mimika dan Asmat kawasan dataran rendah yang padat penduduk, ternyata mampu melaporkan naiknya cakupan sebesar 10% dalam dua minggu terakhir. Sementara Kabupaten Puncak, Mamberamo Tengah, Tolikara dan Intan Jaya melaporkan adanya peningkatan sebesar 3-9%.
- Dua konsultan internasional dalam bidang imunisasi dan komunikasi saat ini ditugaskan untuk mendukung Indonesia selama tiga bulan ke depan. Kedua konsultan akan tiba di Papua minggu depan dan akan berpartisipasi dalam kegiatan Kementerian Kesehatan saat meninjau penanggulangan KLB Polio.

### Lain-lain

- Rotary terus memberikan dukungan berupa T-shirts (kaos), topi, pin, buku dan material KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) lainnya ke banyak kabupaten di Provinsi Papua.
- Relawan Palang Merah (Red Cross Volunteers) telah memberikan dukungan kegiatan Tanggap KLB di Jayapura baik sebagai pemberi vaksin dan penggerak masyarakat.
- CDC Indonesia juga memperkuat dukungan mereka terhadap penanggulangan KLB melalui Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI). Sebanyak sembilan perwakilan (focal point) telah ditempatkan dan secara aktif memberikan dukungan kegiatan Tinjauan Rekam Medis Rumah Sakit (HRR) dan Penilaian Kesiapan Sederhana (Simple Readiness Assessments). Dua konsultan CDC Internasional saat ini berada di Jakarta untuk mendukung kegiatan Tanggap KLB.



Kiri: Ditjen P2P (Dr. Anung Sugihantono), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua (Drg. Aloisius Giyai), Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan (Dr. R. Vensya Sitohang), Staf Ahli Teknologi Kesehatan dan Globalisasi (Dr. Slamet ) pada penandatanganan nota kesepahaman. Kanan: Petugas kesehatan yang melacak di hutan lebat untuk menuju desa Alemson, 61 anak-anak divaksinasi pertama kali dalam hidup mereka. "Medan yang menantang" menjadikan petugas kesehatan melakukan segala upaya untuk mencapai anak terakhir. Foto: Minalia Sofyanto / LSM GAPAI.

## Koordinasi

- Kementerian Kesehatan terus memimpin dan mengoordinasikan dukungan Pemerintah dan mitra untuk semua kegiatan penanggulangan KLB Polio. Pertemuan mingguan di tingkat nasional dan provinsi turut membantu mengoordinasikan kegiatan dan memantau pelaksanaan rencana penanggulangan KLB di tingkat lokal.
- Perwakilan senior Menteri Kesehatan (Penasihat Menteri Kesehatan) telah ditunjuk agar secara langsung dapat mendukung penanggulangan KLB Polio Indonesia, dan setiap minggunya akan terbang ke Jayapura, Papua untuk membahas isu anggaran dan operasional.
- Berbagai upaya masih berlangsung untuk memaksimalkan dukungan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri, yang secara aktif bekerja untuk memastikan semua kegiatan dilakukan oleh Pemerintah dalam penanggulangan KLB.
- Kantor Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat (PHEOC) telah beroperasi sepenuhnya di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi di Jayapura.
- Konferensi video jarak jauh antara WHO/UNICEF, tim nasional serta Provinsi Papua dan Papua Barat terus dilakukan setiap minggu.
- Rotary International dan IFRC/PMI terus memberikan dukungan berharga dalam bentuk mobilisasi masyarakat lokal yang bekerja sama dengan LSM setempat dan kelompok gereja untuk menyentuh dan membangun kesadaran akan vaksinasi Polio

## Langkah Selanjutnya

- Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi, didukung oleh mitra akan terus melakukan pemantauan kemajuan cakupan sub PIN Putaran 2 dan memastikan terpenuhinya target indikator surveilans AFP.
- Tambahan pot tinja, poster AFP, dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Polio telah didistribusikan ke seluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat serta ke seluruh provinsi berisiko tinggi lainnya di Indonesia.
- Kementerian Kesehatan sedang melakukan revisi pedoman surveilans AFP.
- Pelatihan AFP di Papua Barat ditunda hingga tanggal 3-7 September 2019 dikarenakan masalah keamanan

## Jika memerlukan tambahan informasi, silahkan menghubungi:

### Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan.

Email: [poskoklb@yahoo.com](mailto:poskoklb@yahoo.com)  
+62 877 7759 1097

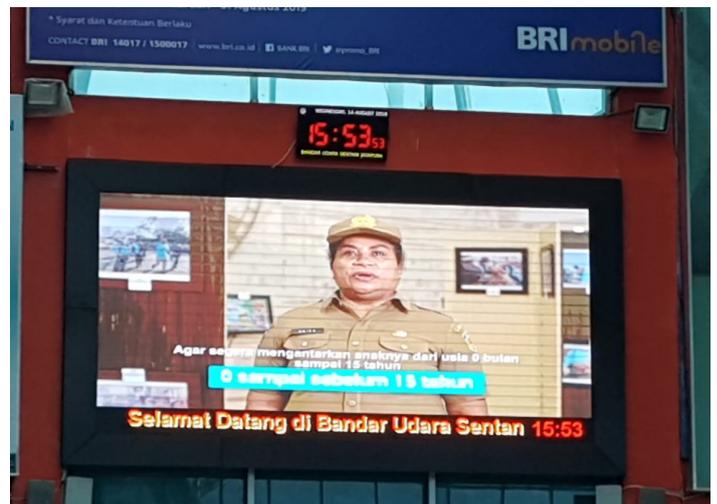
#PHEOCIndonesia  
+62878 0678 3906

### WHO Indonesia

Dr Vinod Bura, Global Polio Eradication Co-ordinator. Email: [burav@who.int](mailto:burav@who.int)  
+62 812 8118 7429

### UNICEF Indonesia

Dr Paul Pronyk, Chief, Child Survival & Development, [ppronyk@unicef.org](mailto:ppronyk@unicef.org)



Kiri: Vaksinasi secara sweeping oleh petugas kesehatan di desa Sikari, kabupaten Paniai, provinsi Papua dan mendapatkan 58 anak yang divaksinasi. Foto: Hermansyah / WHO Indonesia. Kanan: Pengumuman Layanan Publik (PSA) yang ditayangkan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan di Bandara Sentani. Foto: Try Laksono/UNICEF.